

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam diskursus politik kontemporer di Indonesia, identitas primordial tidak pernah benar-benar terpinggirkan oleh arus modernisasi. Sebaliknya, identitas berbasis kekerabatan seperti klan dalam masyarakat Batak sering kali bertransformasi menjadi kekuatan politik yang sangat dinamis. Klan adalah kesatuan kerabat yang didasarkan pada hubungan darah atau garis keturunan dari nenek moyang yang sama. Masyarakat Batak, sebagai salah satu entitas etnis dengan struktur patrilineal yang kuat, memiliki keterikatan yang sangat dalam terhadap identitas klan. Klan ini berfungsi sebagai tanda adanya tali persaudaraan di antara mereka.

Sistem kekerabatan Batak menempatkan klan sebagai basis utama identitas yang tidak terpisahkan dari kehidupan individu. Namun, fungsi klan melampaui sekadar simbol garis keturunan. Ini merupakan kunci pembuka bagi falsafah hidup yang sangat dijunjung tinggi sebagai landasan dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan klan Batak lainnya yaitu *Dalihan Na Tolu* (Marpodang, 1992). Sistem yang mengikat mereka ini terdiri dari unsur *Hula-Hula* (pihak pember isteri), *Dongan Tubu* (saudara satu klan) dan *Boru* (pihak penerima isteri) unsur *Hula-hula*, *Dongan Tubu*, dan *Boru*. Secara teoritis, sistem ini menciptakan keseimbangan dan solidaritas kolektif

yang sulit ditembus oleh pengaruh eksternal. Menurut Koentjaraningrat (2009), sistem kekerabatan dalam masyarakat tradisional Indonesia menjadi dasar utama dalam pembentukan jaringan sosial dan solidaritas kolektif. Solidaritas pada dasarnya ialah sebuah sikap yang dimiliki oleh setiap manusia dalam dirinya. Nilai-nilai solidaritas ini merupakan sebuah ungkapan perasaan manusia atas rasa serasi dan sepenanggungan terhadap orang lain ataupun kelompok sendiri. Arti dari solidaritas dekat dengan arti rasa simpati maupun empati. Di sisi lain Solidaritas sosial menurut Emile Durkheim adalah suatu keadaan individu atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama serta diperkuat oleh pengalaman emosional bersama (Cooley & Pada, 2007).

Namun, Dinamika politik elektoral di Indonesia masih menunjukkan persistensi pola tradisional, di mana loyalitas pemilih sering kali terkonsentrasi pada variabel identitas seperti suku, agama, dan kelompok kekerabatan. Dalam konteks ini, kekuatan politik seorang kandidat sangat ditentukan oleh kemampuannya melakukan penetrasi terhadap jaringan tokoh-tokoh berpengaruh yang menguasai basis massa primordial tersebut. Signifikansi klan dalam arena politik saat ini mengalami pergeseran fungsi dari sekadar identitas kultural menjadi instrumen kekuatan elektoral. Dinamika ini dipengaruhi oleh dua pola interaksi utama, yakni pola

pemberian dan permintaan dukungan yang melibatkan pertukaran kepentingan antara aktor politik dengan komunitas kekerabatan. Klan bertindak sebagai jembatan strategis yang memungkinkan terjadinya penetrasi pengaruh politik secara lebih efektif.

Dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan pendidikan yang telah membawa masyarakat suku Batak ke arah mobilitas yang semakin tinggi. Generasi muda Batak kini banyak yang meninggalkan kampung halaman untuk merantau baik dalam mencari kerja maupun menempuh pendidikan yang terkadang sifatnya sementara maupun ada yang menetap di tempat yang mereka datangi di luar pulau terutama di Pulau Jawa salah satunya Tasikmalaya, provinsi Jawa Barat. Para perantau ini menjadi bagian dari kelompok masyarakat Batak modern yang hidup dalam lingkungan sosial multikultural dan urban. Meskipun demikian, mereka tetap membawa identitas budaya Batak dan nilai-nilai klannya dalam kehidupan sehari-hari. Identitas tersebut tidak hanya melekat secara simbolik, tetapi juga diwujudkan dalam praktik sosial seperti berpartisipasi dalam organisasi kedaerahan salah satunya Forum Masyarakat Batak Tasikmalaya (Formabata) di kota Tasikmalaya. Formabata adalah sebuah paguyuban yang menjadi wadah penguat identitas atau peletarian budaya serta wadah berkumpulnya orang-orang yang berasal dari suku Batak di kota Tasikmalaya. Paguyuban ini berdiri sejak tahun 1990 yang telah mengalami beberapa kali pergantian

nama, mulai dari Ikatan Masyarakat Batak Tasikmalaya (IMABATA) tahun 1990-2020, Himpunan Batak Tasikmalaya (HIMABATA) tahun 2020-2024, hingga saat ini dikenal sebagai Forum Masyarakat Batak Tasikmalaya (FORMABATA).

Klan memiliki peran signifikan dalam membentuk dan mengubah pandangan politik seseorang, terutama dalam masyarakat yang masih kuat terikat oleh struktur sosial tradisional. Klan, yang merupakan kelompok sosial yang terhubung melalui ikatan darah, budaya, dan sejarah, sering kali menjadi pusat dari identitas dan loyalitas individu. Dalam konteks politik, anggota klan cenderung memiliki pandangan yang serupa karena adanya pengaruh dari norma-norma sosial yang mengedepankan kepatuhan terhadap pemimpin klan, serta nilai-nilai yang diwariskan turun-temurun.

Di tanah rantau, kebutuhan untuk menjaga eksistensi mendorong terbentuknya organisasi paguyuban seperti Forum Masyarakat Batak Tasikmalaya (Formabata). Paguyuban ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah pelestarian budaya, tetapi juga menjadi aktor kolektif dalam menavigasi kepentingan politik anggotanya di tengah mayoritas. Eksistensi Formabata sebagai sebuah paguyuban di daerah yang sedang melaksanakan pilkada tentu diperhitungkan. Sebagai kelompok minoritas, masyarakat Batak juga memiliki kepentingan strategis untuk memastikan posisi mereka aman secara sosial dan ekonomi di bawah kepemimpinan yang

terpilih dalam hal ini pilkada kota Tasikmalaya 2024. Di sinilah peran klan mengalami konversi menjadi modal politik. Mobilisasi suara dalam komunitas perantau ini sering kali tidak bersifat transaksional secara materiil, melainkan bersifat emosional-kultural yang didasarkan pada rasa sepenanggungan dan arahan dari struktur informal organisasi.

Berangkat dari berbagai penelitian terdahulu tersebut, peneliti menemukan fenomena yang sangat spesifik dan menarik pada Paguyuban Formabata di Kota Tasikmalaya yang membedakannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil pra-lapangan yang dilakukan melalui wawancara mendalam dengan mantan Ketua Formabata yang menjabat pada periode Pilkada 2024, ditemukan fakta bahwa kekuatan kolektif klan yang terhimpun dalam organisasi ini telah menjadi daya tarik bagi kekuatan politik eksternal. Terungkap bahwa terdapat upaya komunikasi politik yang berupa lobi politik yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon secara langsung kepada pimpinan organisasi dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan basis massa dari kalangan perantau Batak di Tasikmalaya. Kenyataan adanya upaya lobi politik ini menunjukkan bahwa paguyuban Formabata memiliki posisi tawar politik yang diperhitungkan, meskipun organisasi tersebut secara administratif adalah wadah sosial kemasyarakatan.

Beberapa penelitian terdahulu memberikan gambaran yang mendalam mengenai bagaimana identitas etnis dan struktur klan memengaruhi perilaku politik masyarakat. Yeremia Elkana Tua Siburian dan Halking dalam penelitiannya yang berjudul "Peran Tokoh Adat Batak Toba dalam Membentuk Perilaku Memilih pada Pemilihan Kepala Desa Ujung Serdang Tahun 2022" menjelaskan bahwa tokoh adat Batak memiliki otoritas besar dalam mengarahkan suara anggota kelompoknya melalui nilai budaya Dalihan Na Tolu. Kekuatan ini memungkinkan tokoh adat berfungsi sebagai agen sosialisasi yang efektif dalam mengambil keputusan kolektif yang dipatuhi oleh warga semarga.

Sejalan dengan hal tersebut, Ahmad Amiruddin dalam artikelnya "Peran Komunitas dalam Pemenangan Pemilukada" pada Arajang: Jurnal Ilmu Sosial Politik menekankan bahwa komunitas sosial sering kali lebih dipercaya oleh masyarakat bawah dibandingkan partai politik karena adanya ikatan emosional dan solidaritas yang nyata, sehingga komunitas menjadi instrumen kemenangan yang strategis bagi para kandidat.

Dinamika politik dalam organisasi paguyuban juga dipertegas oleh Nurhayani Pohan dalam skripsinya di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary yang berjudul "Preferensi Politik Anggota Dewan Pengurus Daerah Paguyuban Keluarga Besar Pujakesuma Padang Sidempuan dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018". Penelitian tersebut menemukan

bahwa organisasi paguyuban berfungsi sebagai fasilitator politik di mana instruksi dari elit atau pengurus organisasi menjadi rujukan utama bagi anggota, terutama masyarakat perantau, dalam menentukan pilihan politiknya. Namun,

Dalam penelitian Yoggi Alvi Hamdani melalui jurnalnya "Politik Identitas Masyarakat Multietnis Kota Sawahlunto dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018" di JDPL (Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal) memberikan catatan penting bahwa identitas etnis tidak bekerja secara otomatis. Dukungan politik dari kelompok etnis tetap memerlukan proses komunikasi dan strategi pendekatan yang tepat karena pemilih di lingkungan heterogen cenderung lebih dinamis dalam merespons isu-isu identitas.

Penelitian ini memposisikan ikatan etnisitas sosiologis sebagai struktur yang melembaga di dalam Forum Masyarakat Batak Tasikmalaya (FORMABATA). Artinya, kesamaan identitas etnis tidak lagi dilihat sekadar sebagai ikatan emosional pribadi antarperantau, melainkan telah diformalkan ke dalam wadah organisasi. Di mana para tokoh yang dituakan (penasihat) dan pimpinan paguyuban diduga menggunakan struktur resmi organisasi ini sebagai jalur untuk mengoordinasikan dan mengarahkan dukungan politik anggota dalam Pilkada. Mobilisasi suara dalam konteks ini tidak lagi dipahami secara cair, melainkan direpresentasikan melalui instruksi,

legitimasi pengurus, dan ketokohan adat yang terlembagakan di dalam paguyuban. Dengan demikian, penelitian ini ingin melihat bagaimana unit otoritas formal di dalam Formabata menggerakkan massa berbasis etnisitas tersebut dalam momentum politik.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana karakteristik mobilisasi suara berbasis etnis pada Forum Masyarakat Batak Tasikmalaya (FORMABATA) dalam Pilkada Kota Tasikmalaya 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan karakteristik mobilisasi suara berbasis etnis pada Forum Masyarakat Batak Tasikmalaya (FORMABATA) dalam Pilkada Kota Tasikmalaya 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

- 1) Memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan teori mobilisasi politik, khususnya mengenai strategi mobilisasi politik etnis minoritas di wilayah heterogen.
- 2) Memperkaya literatur mengenai transformasi teori Patron-Klien James C. Scott dalam konteks organisasi paguyuban kedaerahan di era demokrasi modern.

- 3) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis.

1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi para civitas akademika di lingkungan ilmu politik mengenai perilaku pemilih.

- 1) Sebagai sarat mutlak untuk menyelesaikan rangkaian tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana ilmu.
- 2) Memberikan masukan dan pandangan bagi pengurus serta anggota Formabata mengenai bagaimana dinamika hubungan patron-klien berjalannya dalam momentum Pilkada, sehingga organisasi dapat lebih bijak dalam menentukan arah kebijakan politik kelompok ke depan.
- 3) Sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi aktor politik mengenai pentingnya pendekatan kultural yang etis dalam menjangkau basis massa etnis minoritas di tingkat lokal.